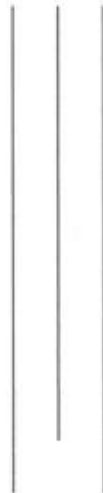


**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN**

Jl. Jaksa Agung R Suprpto No. 11 Padang Telp. (0751) 7052725 – 7054414 Fax (0751) 7059511
Kotak Pos 100 E-Mail : kehutanan@sumberprov.go.id



**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD TAHUN 2023**



PADANG, JANUARI 2023

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat 030-779-2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Provinsi yang berada pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, telah ditetapkan aset berupa tanah, bangunan, kendaraan roda 4, roda 2 maupun barang-barang inventaris lainnya.

Aset tetap milik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagian dimanfaatkan dan dikuasai oleh pihak lain, karena lokasinya di Kabupaten Kota dan sampai saat ini sebagian dari aset tersebut belum dilengkapi bukti kepemilikan (sertifikat) atau bukti pendukung lainnya.

Untuk mengendalikan aset tersebut, Dinas Kehutanan menganggarkan Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD pada DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Meningkatkan pengelolaan Barang Milik Daerah

Tujuan : Menyediakan biaya pajak, asuransi kendaraan dan pemberian tanda kepemilikan tanah

Sasaran : Sasaran Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah terpelihara dan terjaganya aset Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

D. Dasar

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;

E. Sumber Pendanaan

Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Pada SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dibiayai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan Rekening No. 3.28.01.1.03.02.

II. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Uraian Kegiatan

Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Pada SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berupa pembayaran pajak dan asuransi Barang Milik Daerah, dan pemberian plang nama terhadap aset tanah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

B. Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Pada SKPD adalah pada Kabupaten/Kota dimana aset tersebut berada.

C. Pedoman Pelaksanaan

Sesuai dengan arah kebijakan sistem penganggaran yakni berbasis kinerja maka pedoman pelaksanaan sub kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Nama Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah Pada SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
2. Tujuan : Menyediakan pengamanan BMD yang berada di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
3. Sasaran : Terlaksananya tertib administrasi BMD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
4. Input : Dana yang dibutuhkan.
5. Output : Jumlah dokumen pengamanan administrasi yang disusun
Jumlah dokumen pengamanan BMD pada SKPD
Jumlah dokumen pengamanan hukum
Jumlah dokumen usulan penetapan nilai BMD
Jumlah tanda kepemilikan tanah
6. Hasil : Terpeliharanya dan terkendalinya aset Dinas Kehutanan
7. Benefit : Provinsi Sumatera Barat
Meningkatkan Kemampuan ASN dalam Pengelolaan
8. Impact : Pengawasan dan Pengendalian aset SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Meningkatnya tata kelola organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

D. Pelaksana Kegiatan

Sesuai mekanisme penyelenggaraan kegiatan, maka susunan personil pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
2. Penanggung jawab Kegiatan : Sekretaris
3. Pelaksana : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Bendaharawan : Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
5. Anggota : Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

E. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Pada SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yaitu melaksanakan pengamanan BMD dengan membayar asuransi kendaraan dan bangunan serta memberi plang nama terhadap tanah milik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Pada SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 ini disusun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN, *R*



Ir. MASWAL NOOR, M.Si

NIP. 19670122 199301 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di PADANG
2. Bapak Inspektur Provinsi Sumatera Barat di PADANG
3. Ibu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di PADANG
4. Sdr. Bendahara Pengeluaran DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di TEMPAT

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
 Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
 Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 3.28.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : DINAS KEHUTANAN
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 330.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 330.000.000
Keluaran	Jumlah dokumen Pengamanan administrasi yang disusun Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah dokumen pengamanan Hukum Jumlah dokumen usulan penetapan nilai barang milik daerah Jumlah tanda kepemilikan tanah Jumlah tanda letak tanah yang dibangun (seperti pagar batas) Jumlah unit yang dilakukan penjagaan	10 Unit 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 10 Unit/Set 1 Unit/Set 10 Unit
Hasil	Terlaksananya tertib administrasi barang milik daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 330.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 290.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 290.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 276.350.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.750.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 5.750.000
	[#] Pajak Bumi dan Bangunan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.750.000
	[-]					
	Pajak Bumi Dan Bangunan Spesifikasi : Rumah Dinas Pemda Tk I Sumbar	1 Unit / Tahun	Tahun	5.750.000	0	Rp. 5.750.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 270.600.000
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah					Rp. 270.600.000
	[#] Double Cabin					Rp. 174.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Asuransi Kendaraan Dinas Spesifikasi : Premi Asuransi Roda 4 Double Cabin	19 Unit / Tahun	Unit / Tahun	9.200.000	0	Rp. 174.800.000
	[#] Gedung Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 75.000.000
	[-]					
	Asuransi Bangunan/Gedung Spesifikasi : Gedung Kantor	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	25.000.000	0	Rp. 75.000.000
	[#] Minibus Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.800.000
	[-]					
	Asuransi Kendaraan Dinas Spesifikasi : Premi Asuransi Roda 4 Minibus	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	5.200.000	0	Rp. 20.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 13.650.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 13.650.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 13.650.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.650.000
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 91 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 13.650.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 40.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 40.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 40.000.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 40.000.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 40.000.000
	[#] Plang Tanah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 40.000.000
	[-]					
	papan nama kepemilikan aset Spesifikasi : bahan papan plat, bahan tiang besi	10 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp. 40.000.000
Grand Total :						Rp. 330.000.000

Provinsi Sumatera Barat,.....

Kepala Dinas Kehutanan

YOZARWARDI U.P, S.Hut. MSi

NIP. 196904061997011002